

Izin Pertambangan Kepung Sulteng

by : Ruslan Sangaji

Maraknya pembukaan wilayah pertambangan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam.

AKTIFITAS eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren meningkat. Data yang diperoleh dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Palu mencatat, tahun 2007 saja, total luasan areal pertambangan yang mendapatkan izin di Sulteng sebanyak 2,683,020 hektare.

Dari izin tersebut tercatat ada delapan izin kontrak karya (KK) dengan luas 2.311.073 hektar dan izin kuasa pertambangan (KP) sebanyak 146 dengan luas 326.023 hektare. Jumlah tersebut tidak tercatat ada 70 KP baru di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang datanya belum diperbarui.

Areal pertambangan lain yang telah mendapatkan izin daerah atau Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) tercatat sebanyak 68 SIPD dengan luas sebanyak 2.174 hektare, serta ada dua Kontrak Production Sharing dengan luas 43.750 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Di Kabupaten Banggai tercatat ada 30 izin kuasa pertambangan dengan luas 175, 941 hektare. Izin itu untuk mengelola potensi bahan galian jenis A berupa migas, nikel dan marmer. Sedangkan SIPD sebanyak 12 izin dengan luas 12 hektar untuk mengelola bahan galian jenis C berupa pasir dan batu (sirtu).

Di Kabupaten Parigi Moutong ada satu izin kontrak karya (KK) dengan luas 46,400 hektar untuk tambang emas dan satu SIPD untuk jenis galian C berupa marmer.

Di Kabupaten Buol terdapat dua izin kontrak karya dengan luas 766,100 hektare, jenis tambang emas, serta satu izin kuasa pertambangan dengan luas 1,003 hektar bahan galian jenis B berupa chornit.

Meski begitu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah, Najib Godal, mengaku tidak mengetahui soal jumlah kuasa pertambangan di daerahnya itu.

Menurut Najib Godal, yang paling mengetahui soal kuasa pertambangan itu adalah pemerintah kabupaten dan kota, karena merekalah yang mengeluarkan izin kuasa pertambangan tersebut.

"Itu wewenang pemerintah kabupaten. Makanya kami tidak mengetahui berapa jumlah Kuasa Pertambangan yang ada di masing-masing kabupaten. Itulah salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yang kewenangannya penuh berada di kabupaten dan kota," katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Wilianita Selviana mengatakan, maraknya pembukaan wilayah pertambangan di daerah ini, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam.

Dalam kasus terakhir saja, katanya, banjir melanda hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Banjir terjadi di Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, Poso, Morowalu dan Donggala. Tak terhitung lagi kerugian yang diakibatkan oleh adanya banjir tersebut.

Tapi yang pasti, kata Wilianita Selviana, semua musibah banjir itu karena adanya pembukaan kawasan pertambangan dan adanya penebangan hutan secara besar-besaran. "Jika kondisi ini tidak dikontrol, saya yakin Sulawesi Tengah ini akan tenggelam setiap kali ada hujan," ujarnya.